

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang semakin pesat menuntut institusi pendidikan dan pelatihan untuk terus berinovasi dalam menghadapi tantangan global. Transformasi teknologi, perubahan kebutuhan industri, dan persaingan antar lembaga pendidikan menuntut setiap institusi mampu meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas operasionalnya agar tetap relevan dan kompetitif. Dalam konteks ini, institusi pendidikan dan pelatihan dituntut tidak hanya menyediakan layanan akademik yang unggul, tetapi juga mampu mengelola sumber daya secara profesional untuk menghasilkan output yang optimal (Mubarok 2024). Kemampuan institusi dalam menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan eksternal menjadi faktor penting untuk mempertahankan keberlanjutan dan relevansi lembaga dalam jangka panjang (Mesiono et al. 2024).

Badan Layanan Umum hadir sebagai salah satu instrumen pemerintah yang memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas layanan publik. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, lembaga ini diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan agar lebih efisien, produktif, dan profesional tanpa mengutamakan tujuan mencari keuntungan (Peraturan.bpk.go.id 2012). Instansi ini berfokus untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menerapkan prinsip efisiensi,

produktivitas dan praktik bisnis yang sehat. Keberadaan instansi membuka peluang bagi satuan kerja pemerintah untuk lebih efektif dalam menjalankan fungsi operasional pelayanan publik dibandingkan birokrasi konvensional (Sawir 2020).

Keberhasilan Badan Layanan Umum dalam menjalankan fungsinya dapat diukur melalui kinerja keuangan dan efektivitas layanan yang diberikan. Kinerja keuangan menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana Badan Layanan Umum mampu mengelola sumber daya secara optimal, memenuhi kewajiban keuangan, serta menghasilkan output yang bermanfaat bagi masyarakat (Tuu et al. 2023). Penilaian kinerja yang baik menunjukkan kemampuan Badan Layanan Umum dalam menjalankan visi dan misi institusi, menunjang kualitas layanan, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat yang dilayani (Nurliah et al. 2023).

Badan Layanan Umum, termasuk Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun saat ini menghadapi sejumlah isu dan tantangan dalam pengelolaan keuangan. Salah satu isu utama adalah menjaga keseimbangan antara fleksibilitas keuangan dan akuntabilitas (Isti'anah and Utomo 2024). Kendala lain meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, pengawasan internal yang belum optimal, serta pengaruh dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal pemerintah (Nurchoiriyah et al. 2025). Tantangan-tantangan ini berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan anggaran dan memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, Badan Layanan Umum PPI Madiun juga harus mampu meningkatkan penerimaan dari layanan yang diberikan, di tengah keterbatasan dana pemerintah dan persaingan dengan lembaga pendidikan lain.

Tantangan tersebut dapat dihadapi dengan melakukan analisis kinerja keuangan yang baik. Analisis ini berfungsi untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pengelolaan anggaran serta memberikan dasar bagi perbaikan strategi manajerial. Pendekatan berbasis indikator keuangan memungkinkan manajemen Badan Layanan Umum PPI Madiun memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan, mengidentifikasi masalah yang muncul, serta mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Analisis berikut sejalan dengan prinsip *good governance* yang memfokuskan transparansi, serta akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Dalam praktiknya, analisis keuangan berikut menjadi formula utama untuk menilai kinerja Badan Layanan Umum. Rasio keuangan, khususnya aspek likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi, serta menyajikan proyeksi mengenai kompetensi Badan Layanan Umum dalam menunaikan kewajiban jangka pendek, mengelola aset, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran. Analisis rasio keuangan juga relevan dalam konteks aspek layanan jasa, karena kinerja keuangan yang baik akan mendukung peningkatan kualitas layanan yang diterima masyarakat, sejalan dengan fokus instansi ini dalam menyajikan pelayanan publik yang prima.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa evaluasi kinerja keuangan pada instansi BLU memiliki relevansi yang tinggi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan kualitas layanan. Syahromi & Cheisviyanny (2020) menemukan bahwa penerapan pola pengelolaan keuangan BLU di Universitas Negeri Padang meningkatkan kinerja keuangan meskipun rasio

keuangan belum sepenuhnya stabil. Penelitian Palupi et al., (2023) menekankan pentingnya rasio likuiditas dan kinerja layanan pada BLU Universitas Brawijaya untuk memastikan operasional berjalan efisien. Alifa & Sulaeman (2023) menunjukkan keterkaitan antara alokasi anggaran dan karakteristik institusi terhadap kinerja BLU, sedangkan Nurliah et al., (2023) dan Keumala et al., (2023) menekankan pentingnya analisis rasio keuangan dalam mengevaluasi kesehatan keuangan BLU di sektor rumah sakit. Penelitian Rianti (2021) dan Norhikmah (2024) menyoroti aspek pengawasan dan tantangan operasional BLUD, sedangkan Hanimalkan & Quddus (2024) serta Puspita (2024) menekankan penerapan fleksibilitas pengelolaan keuangan di institusi pendidikan. Selain itu, penelitian Tuu et al., (2023) dan Muhammad (2024) menekankan pentingnya strategi implementasi sistem pengelolaan keuangan BLU/BLUD untuk mendukung efisiensi dan efektivitas layanan. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan persamaan dalam menekankan pentingnya pengelolaan keuangan BLU melalui rasio keuangan, fleksibilitas, dan pengawasan, namun berbeda konteksnya, mulai dari rumah sakit, perguruan tinggi umum, hingga lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Temuan-temuan ini menjadi dasar ilmiah yang memperkuat relevansi dan urgensi penelitian mengenai kinerja keuangan BLU di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.

Berlandaskan uraian penelitian tersebut, urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk mengevaluasi kinerja keuangan BLU PPI Madiun secara komprehensif dan sistematis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan pengelolaan keuangan, serta menjadi

dasar bagi perbaikan kebijakan dan strategi manajemen. Evaluasi kinerja keuangan yang menyeluruh akan mendukung pencapaian target institusi, optimalisasi penggunaan sumber daya publik, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh BLU PPI Madiun.

Pengkajian ini berfokus untuk menganalisis kinerja keuangan instansi BLU PPI Madiun, dengan fokus pada rasio likuiditas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan anggaran, sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan strategis institusi. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti termotivasi untuk mengangkat judul “Analisis Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Tahun 2022–2024”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam analisis ini adalah “Bagaimana kinerja keuangan Badan Layanan Umum di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Tahun 2022–2024?”.

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah diatas, maka tujuan analisis ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pada Badan Layanan Umum di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Tahun 2022–2024.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Bagi Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun diharapkan dapat memberikan informasi dan evaluasi terkait kinerja keuangan sehingga dapat

dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan.

2. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi yang berkaitan dengan Badan Layanan Umum lembaga pendidikan dan pelatihan di Bidang Transportasi Tahun 2022–2024, terutama bagi mahasiswa Politeknik Perkeretaapian Indonesia.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan analisis ini dapat menyuguhkan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai analisis kinerja keuangan, khususnya pada Badan Layanan Umum lembaga pendidikan dan pelatihan di Bidang Transportasi Tahun 2022–2024.
4. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan terkait pemberian status Badan Layanan Umum, khususnya dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga pendidikan dan pelatihan di bawah naungannya.